

Selasa, 28 September 2021

FM-CC-AAJI-006-00

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Judul          | BERITA FOTO – Pendapatan Premi Asuransi Jiwa   |
| Nama Media     | Bisnis Indonesia                               |
| Newstrend      | Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Semester I/2021 |
| Halaman/URL    | 15                                             |
| Tanggal Berita | 2021-09-28                                     |
| Sentimen       | Netral                                         |

## ■ PENDAPATAN PREMI ASURANSI JIWA



Bisnis/Suselo Jati

**Karyawan beraktivitas** di dekat logo beberapa perusahaan asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta, belum lama ini. AAJI mencatat sampai dengan Juni 2021, pendapatan premi produk

*unit-linked* industri asuransi jiwa mencapai Rp64,44 triliun atau tumbuh 17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kontribusinya mencapai 62% terhadap total pendapatan premi industri asuransi jiwa.

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Judul</b>          | Tips Memilih Asuransi Unit Link |
| <b>Nama Media</b>     | Investor Daily                  |
| <b>Newstrend</b>      | Edukasi Calon Nasabah Unitlink  |
| <b>Halaman/URL</b>    | 24                              |
| <b>Tanggal Berita</b> | 2021-09-28                      |
| <b>Sentimen</b>       | Netral                          |



# Pojok Literasi

## TIPS MEMILIH ASURANSI UNIT LINK

Beragamnya layanan jasa keuangan nonbank saat ini menuntut kita semakin jeli dalam menyeleksi sebelum menentukan pilihan. Salah satunya unit link atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI). Layanan produk asuransi tersebut menjadi alternatif menarik karena menawarkan proteksi sekaligus investasi. Berbagai iming-iming dan bonus pun diobral sebagai daya tarik. Namun, jangan terburu-buru jika Anda tak ingin tertipu.

Maraknya masalah yang merugikan nasabah atau konsumen di institusi jasa keuangan bisa terjadi lantaran banyak nasabah yang tergiur imbal hasil besar serta terjadinya miss-selling yang dilakukan marketing lembaga keuangan. Ada dua hal utama penyebab terjadinya miss-selling, yaitu nasabah tidak memahami sepenuhnya produk yang digunakannya, atau cara penawaran dan penjualan yang tidak baik. Untuk menghindari miss-selling, OJK juga akan mengimplementasikan market conduct. Di mana setiap produk yang dikeluarkan oleh lembaga jasa keuangan harus jelas baik dari sisi jenis produk, risiko, cara penjualan, dan sebagainya.

Beberapa tips berikut bisa Anda gunakan sebagai panduan sebelum memilih unit link yang Anda butuhkan.

Pertama, pastikan perusahaan dan produk asuransi yang ditawarkan sudah terdaftar dan diawasi OJK. Bila Anda masih ragu dan ingin memastikan, cek website resmi OJK atau hubungi kontak 157 serta nomor WhatsApp 081157157157.

Kedua, sesuaikan dengan kebutuhan proteksi dan kemampuan finansial Anda untuk membayar polis. Semakin banyak layanan proteksi yang Anda cantumkan, maka biaya asuransi yang dibebankan juga akan semakin besar.

Ketiga, pahami risiko investasi dalam asuransi. Asuransi unit link merupakan kombinasi asuransi dan investasi yang memiliki risiko fluktuasi. Naik dan turun nilainya tergantung pada jenis investasi yang dipilih. Sebut saja investasi saham, pendapatan tetap, pasar uang, investasi campuran, dan investasi syariah. Masing-masing pilihan investasi memiliki tingkat return dan risiko yang berbeda.

Keempat, pahami hak dan kewajiban konsumen dalam polis asuransi. Cermati isi polis pasal per pasal yang mengatur risiko yang dijamin, risiko yang dikecualikan, kewajiban pembayaran premi dan konsekuensi keterlambatan, prosedur pelaporan klaim dan dokumen yang dibutuhkan, serta prosedur pengaduan. Perusahaan asuransi akan memberikan free look period bagi nasabah untuk dapat mempelajari isi polis dengan baik. Dalam masa itu, nasabah dapat membatalkan perjanjian apabila tidak menyetujui ketentuan dalam polis.

Kelima, gunakan agen pemasar berkompeten dan bersertifikasi khusus dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) atau pialang asuransi. Asuransi bukan multi level marketing (MLM) dan nasabah bukan agen pemasar. Waspada iming-iming komisi besar.

Keenam, lakukan evaluasi secara berkala. Bila perlu, lakukan perubahan jenis kebutuhan proteksi dan investasi sesuai perkembangan kebutuhan Anda.

Jika terdapat permasalahan (dispute) antara perusahaan asuransi dan nasabah atau pemegang polis, agar diselesaikan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Apabila tidak mencapai kesepakatan, OJK telah mengatur proses penanganan penyelesaiannya, yaitu melalui mediasi, lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan. (th)

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Judul</b>          | Allianz Indonesia Paparkan Fasilitas Isoman Sehat dalam Webinar Customer Day 2021                                                                                                                                                                       |
| <b>Nama Media</b>     | Investor.id                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Newstrend</b>      | Program ISOMAN Sehat Allianz Indonesia                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Halaman/URL</b>    | <a href="https://investor.id/finance/264885/allianz-indonesia-paparkan-fasilitas-isoman-sehat-dalam-webinar-customer-day-2021">https://investor.id/finance/264885/allianz-indonesia-paparkan-fasilitas-isoman-sehat-dalam-webinar-customer-day-2021</a> |
| <b>Tanggal Berita</b> | 2021-09-27                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sentimen</b>       | Netral                                                                                                                                                                                                                                                  |



Allianz Indonesia menggelar webinar series dengan topik 'Perencanaan dan Penanganan Covid-19 pada Pasien Komorbid' untuk nasabah dan masyarakat umum.

#### Allianz Indonesia Paparkan Fasilitas Isoman Sehat dalam Webinar Customer Day 2021

Senin, 27 September 2021 | 1081188  
Investor Daily



JAKARTA, investor.id - Allianz Indonesia menggelar webinar series dengan topik "Perencanaan dan Penanganan Covid-19 pada Pasien Komorbid" untuk nasabah dan masyarakat umum. Webinar ini merupakan salah satu dari rangkaian program Cintai Keluarga & Cintai Bumi yang diselenggarakan oleh Allianz Indonesia, untuk memberikan apresiasi kepada nasabah. Khususnya menyambut Hari Pelanggan dan Hari Asuransi selama bulan September dan Oktober 2021.

Program ini menjadi momentum untuk mengapresiasi nasabah yang selama ini telah mempercayakan Allianz Indonesia dalam memenuhi beragam kebutuhan pertindungannya.

Rangkaian kegiatan ini terdiri dari berbagai webinar dengan topik pembahasan yang relevan dengan situasi saat ini bagi nasabah serta masyarakat umum.

Dian Ekawati, Head of Customer Relationship Management Allianz Indonesia memaparkan mengenai program Cintai Keluarga & Cintai Bumi.

"Meskipun masa pandemi belum berakhir, tak menjadikan Allianz Indonesia surut dalam menyuarakan komitmen untuk memberikan perlindungan dan layanan prima kepada nasabah. Hal ini merupakan bentuk dukungan Allianz Indonesia terhadap nasabah untuk memberikan cinta kepada keluarga melalui perlindungan asuransi. Selain itu yang tak kalah penting adalah rasa cinta terhadap bumi sebagai tempat tinggal kita. Kami mengajak nasabah untuk mendukung kegiatan bumi dengan mengurangi konsumsi kertas dan memaksimalkan korespondensi elektronik, serta layanan dan transaksi digital di Allianz. Setiap satu polis elektronik yang diterbitkan, Allianz akan menyumbangkan 1 pohon untuk kesehatan bumi tercinta," ujarnya, dalam keterangan yang diterima Senin (27/9/2021).

Topik yang diangkat dalam webinar kali ini memberikan edukasi bagaimana upaya yang dapat dilakukan pasien komorbid untuk mencegah efek Covid-19 yang lebih berat, serta bagaimana penanganannya apabila sudah terpapar virus tersebut. Allianz menghadirkan dr Vito A. Damay, SpJ(K), FIKM, Dokter yang wajahnya tentu tak asing di layar televisi serta di media sosial karena ia aktif memberikan informasi seputar kesehatan diberbagai platform.

"Agar kita dapat bertahan melewati pandemi ini, selain menjalankan protokol kesehatan kita juga perlu mengendalikan komorbid. Komorbid dapat menjadi sebuah bom waktu apabila tidak dikelola sejak dini. Efek yang timbul dari pasien komorbid akan lebih parah dan berdampak pada fungsi organ secara jangka panjang. Untuk mencegah risiko yang lebih parah maka lakukanlah pencegahan dengan mendeteksi komorbid sejak dini serta menerapkan pola hidup yang baik dan mengurangi efek komorbid dengan mengobatinya," ujar dr Vito.

Selanjutnya sejalan dengan komitmen Allianz untuk senantiasa menyediakan produk dan layanan terbaik untuk nasabah, Allianz mendukung penanganan Covid-19 dengan memberikan manfaat perlindungan khusus untuk nasabah asuransi kesehatan perorangan dalam program Isoman Sehat. Program ini mendukung nasabah untuk melakukan isolasi mandiri dengan layanan serta penyediaan perlengkapan yang dibutuhkan pasien untuk menunjang kesehatannya.

Isoman Sehat, diperuntukkan bagi nasabah yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan kondisi ringan dan tanpa gejala.

Nantinya pasien Isoman ini akan diberi paket isolasi mandiri yang terdiri dari obat (antibiotik, antivirus, dan parasetamol), vitamin, serta suplemen yang dibutuhkan selama isolasi mandiri. Allianz juga memberikan thermometer, masker, dan masker medis sebagai fasilitas pendukung. Paket Isoman ini akan dikirimkan melalui jasa kurir Go-send atau JNE YES agar dapat langsung diterima oleh pasien segera setelah dikonfirmasi dari HaeDoc.

Pasien Isoman juga diberikan layanan konsultasi secara gratis dengan dokter pribadi dari HaeDoc selama 14 hari masa isolasi mandiri. Dokter dari HaeDoc akan melakukan monitoring secara berkala terkait kondisi pasien selama isolasi mandiri dan pasien dapat terus berkonsultasi selama periode monitoring berlangsung.



Karli Zukaman, Director & Chief Marketing Officer Allianz Life Indonesia

Karli Zukaman, Direktur & Chief Marketing Officer Allianz Life Indonesia menambahkan mengenai program perlindungan tambahan terkait Covid-19 bagi nasabah.

"Banyak keluarga yang khawatir akan tersedek atau tidaknya fasilitas kesehatan bagi pasien Covid-19. Untuk itu Allianz Indonesia memperluas manfaat perlindungan khusus untuk nasabah Asuransi Kesehatan perorangan, dengan program Isoman Sehat.

Dengan adanya program ini, nasabah tidak perlu cemas apabila harus menjalani isolasi mandiri di fasilitas bukan rumah sakit, atau di rumah sendiri."

Hal inilah program Isoman Sehat ini menjadi bukti kepedulian Allianz Indonesia untuk bersama-sama melawan isu penyebaran Covid-19 di Indonesia dengan membantu lebih banyak pasien yang sembuh lewat dukungan program Isoman Sehat ini.

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Judul</b>          | IFG LIFE Berencana Buka 21 Kantor Perwakilan |
| <b>Nama Media</b>     | Ekonomi Neraca                               |
| <b>Newstrend</b>      | Cabang Baru IFG Life                         |
| <b>Halaman/URL</b>    | 5                                            |
| <b>Tanggal Berita</b> | 2021-09-28                                   |
| <b>Sentimen</b>       | Netral                                       |

## IFG Life Berencana Buka 21 Kantor Perwakilan

### NERACA

Jakarta - IFG Life akan membuka 21 kantor perwakilan di 60 kota seluruh Indonesia. Hal ini menyusul peresmian pada 1 November 2021 mendatang. Direktur Keuangan dan Investasi IFG Life Farid Azhar Nasution mengatakan berbagai produk asuransi juga disediakan perusahaan, seperti produk asuransi jiwa dan kesehatan yang komprehensif dan fokus pada proteksi.

"Sebanyak 21 kantor perwakilan untuk menjangkau kurang lebih 60 kota di seluruh Indonesia. Kami akan melindungi setiap fase kehidupan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, menikah hingga pensiun," ujarnya saat webinar seperti dikutip Senin (27/9).

Selain itu, IFG Life juga menyiapkan ribuan agen untuk menggaet lebih banyak nasabah di berbagai daerah. Tak tanggung-tanggung, jumlah agen yang dilibatkan sebanyak seribu orang. "Jika sudah launching 1 November 2021, agen sudah mulai bekerja secara optimum di daerah masing-masing. Walau baru berdiri, teman-teman jangan khawatir dan bisa datang ke kantor dan menemui agen kami," ungkap Farid.

Mengutip situs resmi perusahaan, ada dua produk yang dikeluarkan untuk memberikan proteksi secara menyeluruh kepada nasabah. Pertama produk individu seperti IFG Life Prime Protection, IFG Personal Accident dan IFG Ultimate Protection.

Kedua, produk kumpulan yang memberikan proteksi kepada grup atau kumpulan. Adapun produk IFG Proteksi Kematian dan IFG Personal Accident yang memberikan perlindungan berupa pemberian uang asuransi jika tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan.

IFG Life sudah mengantongi pendapatan Rp 1,63 miliar pada Juni 2021. Pendapatan tersebut diperoleh dari berbagai sumber bisnis perusahaan. Merujuk laporan keuangan perusahaan, pendapatan IFG Life berasal dari hasil investasi Rp 1 miliar, pendapatan premi Rp 7 juta dan pendapatan lain Rp 626 juta.

Pada tahun ini, perusahaan fokus pada pengalihan portofolio baik aset maupun polis Jiwasraya yang sudah direstrukturisasi. Sementara dari sisi premi, perusahaan tidak pasang target terlalu besar. "Kami punya target premi, itu semua bergantung pada premi lanjutan (renewal premium) dari polis yang sudah direstrukturisasi," ucapnya. @ hari

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Judul</b>          | Kinerja Unit-linked Tetap Moncer Meski Aturan Bakal Diperketat                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nama Media</b>     | Bisnis.com                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Newstrend</b>      | Regulasi Terkait PAYDI (Unitlink)                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Halaman/URL</b>    | <a href="https://finansial.bisnis.com/read/20210928/215/1447616/kinerja-unit-linked-tetap-moncer-meski-aturan-bakal-diperketat">https://finansial.bisnis.com/read/20210928/215/1447616/kinerja-unit-linked-tetap-moncer-meski-aturan-bakal-diperketat</a> |
| <b>Tanggal Berita</b> | 2021-09-28                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sentimen</b>       | Netral                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Kinerja Unit-linked Tetap Moncer Meski Aturan Bakal Diperketat

*Langkah CUK yang akan mengatur lebih ketat pemasaran produk unit-linked diharapkan dapat membuat pemasaran produk unit-linked menjadi lebih transparan sehingga nasabah mengerti fitur produk tersebut secara jelas.*

**Dennis Rianjaya Melanina** - Bisnis.com  
18 September 2021 | 08:04 WIB



*Ilustrasi Asuransi - Reuters*

**Bisnis.com, JAKARTA** - Pelaku usaha di sektor asuransi jiwa memandang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau lebih dikenal sebagai unit-linked masih diminati masyarakat, di tengah rencana pengetatan produk unit-linked oleh regulator.

I hal ini terlihat dari pendolatan premi dari produk unit-linked yang masih menunjukkan kinerja positif sepanjang semester I/2021. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat sampai dengan Juni 2021, pendolatan premi produk unit-link industri asuransi jiwa mencapai Rp64,44 triliun atau tumbuh 17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kontribusinya mencapai 62 persen terhadap total pendapatan premi industri asuransi jiwa.

Ketua Dewan Pengurus AAJI Hedi Tampubolon mengatakan, tumbuhnya kinerja dan besarnya kontribusi tersebut menunjukkan produk unit-link masih diminati dan menjadi primadona masyarakat. Terkait banyaknya kasus atau keluhan yang muncul terkait produk unit-link ini, dia percaya dapat diatasi dengan baik oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa.

**Baca Juga :** Produk Unit-linked Sumbang Pertumbuhan Premi Sinamas MSIG Life

"Ada nasabah yang sebelumnya happy dengan unit-link, yang kebutuhan acuannya terjawab dengan produk ini dan ternyata produknnya masih jadi produk utama, hampir 2/3 produk asuransi jiwa yang ada di market Indonesia adalah PAYDI," ujar Budi, belum lama ini.



**Asuransi Premi**

Dia juga menyebut, premi bisnis lanjutan yang didominasi produk unit-linked juga masih tumbuh positif. Premi bisnis lanjutan sepanjang semester I/2021 tercatat mencapai Rp36,7 triliun atau tumbuh 2,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kabid Operasional dan Perlindungan Konsumen AAJI Freddy Triandris menambahkan bahwa produk unit-linked sebelumnya merupakan produk yang bagus, hanya saja banyak nasabah yang tidak mengerti fitur produk asuransi yang di bundling dengan investasi tersebut sehingga menimbulkan banyak keluhan.

**Baca Juga :** Pelaku Asuransi Jiwa: Standardisasi Transparansi Perjualan Unit-linked Diperlukan

"Walaupun unit-linked dalam beberapa kasus ada masalah, tapi sudah berhasil diselesaikan. Ini, anggotanya (perusahaan premi unit-linked) tetap naik. Homogenitas yang memang, ya tetap baik. Produk ini pasti tetap akan dibeli," kata Freddy.



Dia pun mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur lebih ketat pemasaran produk unit-linked ini. "Inisiatifkan pengaturan tersebut dapat membuat pemasaran produk unit-linked menjadi lebih transparan sehingga nasabah mengerti fitur produk tersebut secara jelas.

Kepala Binasatuk Pengawasan RKN OJK Herwinandi mengatakan aturan baru terkait pengiklatan pemasaran produk unit-linked dapat diturunkan pada tahun ini dalam bentuk Surat Edaran (SE). Poin utama dalam aturan baru tersebut adalah mendorong perusahaan asuransi untuk lebih transparan dalam melakukan penjualan produk unit-linked dan memastikan pemahaman nasabah atas karakteristik produk unit-linked.

Transparansi perusahaan dan pemahaman nasabah, menurutnya, menjadi kunci untuk menghindari potensi dispute yang ditimbulkan dari produk tersebut. "Palingnya, banyak protes muncul karena nasabah tidak memahami adanya risiko penurunan unit-linked karena pengaruh fluktuasi pasar modal. I hal ini mengingat mayoritas penempatan investasi oleh perusahaan asuransi ada di pasar modal.

"Dalam SI- ini tadinya kami mau bicara, karena ini dikaitkan dengan investasi yang boleh menjadi adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan risiko pasar modal. Waktu itu sempat terbelit pakai SID (Single Investor Identification) tapi dapat (lontaran), kami cari lagi solusinya," ungkap Herwinandi dalam sebuah FGD, Kamis (16/9/2021).

"Pembuatannya (aturan unit-linked) agak drastis. Diterapkan hal saat ini masih didiskusikan. Kami sebelumnya ada target dalam tahun ini peraturan SE baru keluar," imbuhnya.

Sementara itu, PT Asuransi Jiwa Sinamas MSIG Tbk (Sinamas MSIG Life) juga mencatatkan pertumbuhan premi produk unit-linked sepanjang semester I/2021.

Presiden Direktur Sinamas MSIG Life Wanto Chen mengatakan, perusahaan membuktikan pendapatan premi bisnis premi Rp1,9 triliun sepanjang semester I/2021 atau naik 48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi produk, pertumbuhan penjualan premi ini didorong oleh produk unit-linked.

"Unit-linked tumbuh 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara produk tradisional tumbuh 20 persen. Saya lihat ada dua hal. Untuk yang tradisional ini didorong karena memang demand naik karena kepastian masyarakat terutama akibat kondisi Covid-19. Untuk single premium dan unit-linked ini banyak dipengaruhi situasi market," katanya menjawab pertanyaan Bisnis, baru-baru ini.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Judul</b>          | OJK Perketat Aturan Unit-linked, AAJI: Tetap Jadi Primadona                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nama Media</b>     | Bisnis.com                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Newstrend</b>      | Regulasi Terkait PAYDI (Unitlink)                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Halaman/URL</b>    | <a href="https://finansial.bisnis.com/read/20210927/215/1447453/ojk-perketat-aturan-unit-linked-aaji-tetap-jadi-primadona">https://finansial.bisnis.com/read/20210927/215/1447453/ojk-perketat-aturan-unit-linked-aaji-tetap-jadi-primadona</a> |
| <b>Tanggal Berita</b> | 2021-09-27                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sentimen</b>       | Netral                                                                                                                                                                                                                                          |

## OJK Perketat Aturan Unit-linked, AAJI: Tetap Jadi Primadona

Pendapatan premi produk unit-link berkontribusi hingga 62 persen terhadap total pendapatan premi industri asuransi jiwa



Denis Riantiza Melbano - Bisnis.com  
27 September 2021 / 10:07 WIB



Ilustrasi asuransi - Reuters

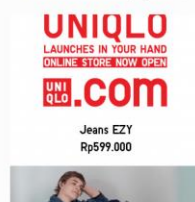
**Bisnis.com, JAKARTA** - Pelaku usaha di sektor asuransi jiwa memandang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau lebih dikenal sebagai unit-linked masih diminati masyarakat, di tengah rencana pengetatan produk unit-linked oleh regulator.

Hal ini terlihat dari perolehan premi dari produk unit-linked yang masih menunjukkan kinerja positif sepanjang semester I/2021. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat sampai dengan Juni 2021, pendapatan premi produk unit-link industri asuransi jiwa mencapai Rp64,44 triliun atau tumbuh 17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kontribusinya mencapai 62 persen terhadap total pendapatan premi industri asuransi jiwa.

Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tempubolon mengatakan, tumbuhnya kinerja dan besarnya kontribusi tersebut menunjukkan produk unit-link masih diminati dan menjadi primadona masyarakat. Terkait banyaknya kasus atau keluhan yang muncul terkait produk unit-link ini, dia percaya dapat ditangani dengan baik oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa.

**Baca Juga : Pelaku Asuransi Jiwa: Standardisasi Transparansi Penjualan Unit-linked Diperlukan**

"Ada nasabah yang sebetulnya happy dengan unit-link, yang kebutuhan asuransinya terjawab dengan produk ini dan ternyata produknya masih jadi produk utama, hampir 2/3 produk asuransi jiwa yang ada di market Indonesia adalah PAYDI," ujar Budi, belum lama ini.



Dia juga menyebut, premi bisnis lanjutan yang didominasi produk unit-linked juga masih tumbuh positif. Premi bisnis lanjutan sepanjang semester I/2021 tercatat mencapai Rp36,7 triliun atau tumbuh 2,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kabid Operasional dan Perlindungan Konsumen AAJI Freddy Thamrin menambahkan bahwa produk unit-linked sebetulnya merupakan produk yang bagus, hanya saja banyak nasabah yang tidak mengerti fitur produk asuransi yang di-bundling dengan investasi tersebut sehingga menimbulkan banyak keluhan.

**Baca Juga : Siap-Siap! Pengelolaan Investasi Produk Unit-linked Akan Diperketat**

"Walaupun unit-linked dalam beberapa kasus ada masalah, tapi sudah berhasil diselesaikan. Toh, angkanya [perolehan premi unit-linked] tetap naik. Pemegang polis yang mengerti, ya tetap beli. Produk ini pasti tetap akan dibeli," kata Freddy.

Judul Produk Unit-Linked Tetap Memesona

Nama Media Bisnis Indonesia

Newstrend Regulasi Terkait PAYDI (Unitlink)

Halaman/URL 15

Tanggal Berita 2021-09-28

Sentimen Netral

| PENGETATAN REGULASI |

## PRODUK UNIT-LINKED TETAP MEMESONA

Bisnis, JAKARTA — Pelaku usaha di industri asuransi jiwa optimistis produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau *unit-linked* masih diminati masyarakat kendati ada rencana regulator memperketat regulasi produk tersebut.



**K**etua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampung mengatakan bahwa minat masyarakat membeli produk asuransi *unit-linked* masih tinggi tercermin dari kinerja sampai dengan semester I/2021.

Menurutnya, banyaknya kasus atau komplain yang muncul terkait dengan produk *unit-linked* dapat ditangani dengan baik oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa.

"Ada nasabah yang sebetulnya *happy* dengan *unit-linked*, yang kebutuhan asuransinya terjawab dengan produk ini dan ternyata produknya masih jadi produk utama, hampir dua per tiga produk asuransi jiwa yang ada di market Indonesia adalah PAYDI [produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi]," ujar Budi, belum lama ini.

AAJI mencatat perolehan premi dari produk *unit-linked* yang masih menunjukkan kinerja positif sepanjang semester I/2021 tercermin dari pendapatan premi produk *unit-linked* industri asuransi jiwa mencapai Rp64,44 triliun atau tumbuh 17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kontribusinya mencapai 62% terhadap total pendapatan premi industri asuransi jiwa. Dia juga menyebut, premi bisnis lanjutan yang didominasi produk *unit-linked* juga masih tumbuh positif. Premi bisnis lanjutan sepanjang semester I/2021 tercatat mencapai Rp36,7 triliun atau tumbuh 2,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Ketua Bidang Operasional dan Perlindungan Konsumen AAJI Freddy Thamrin menyatakan produk *unit-linked* sebetulnya merupakan produk yang bagus, hanya saja banyak nasabah yang tidak mengerti fitur produk asuransi yang *di-bundling* dengan investasi tersebut sehingga menimbulkan banyak komplain.

"Walaupun *unit-linked* dalam beberapa kasus ada masalah, tapi sudah berhasil diselesaikan. Toh, angkanya [perolehan premi *unit-linked*] tetap naik. Pemegang polis yang mengerti, ya tetap beli. Produk ini pasti tetap akan dibeli," kata Freddy.

Dia mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur lebih ketat pemasaran produk *unit-linked* ini. Diharapkan pengaturan tersebut dapat membuat pemasaran produk *unit-linked* menjadi lebih transparan sehingga nasabah mengerti fitur produk tersebut secara jelas.

### TRANSPARAN

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi mengatakan aturan baru terkait pengetatan pemasaran produk *unit-linked* dapat diterbitkan pada tahun ini dalam bentuk Surat Edaran (SE).

Poin utama dalam aturan baru tersebut adalah mendorong perusahaan asuransi untuk lebih trans-

paran dalam melakukan penjualan produk *unit-linked* dan memastikan pemahaman nasabah atas karakteristik produk *unit-linked*.

Transparansi perusahaan dan pemahaman nasabah, menurutnya, menjadi kunci untuk menghindari potensi *dispute* yang ditimbulkan dari produk tersebut.

Adanya protes nasabah karena biasanya tidak memahami adanya risiko penurunan *unit-linked* karena pengaruh fluktuasi pasar modal. Hal ini mengingat mayoritas penempatan investasi oleh perusahaan asuransi ada di pasar modal.

"Dalam SE ini tadinya kami mau batasi, karena ini dikaitkan dengan investasi yang boleh membeli adalah orang-orang yang sudah terbukti mengerti risiko pasar modal. Waktu itu sempat terbesit pakai SID [single investor identification] tapi dapat tantangan, kami cari lagi solusinya," ungkap Riswinandi dalam sebuah FGD, Kamis (16/9).

“

Ada nasabah yang sebetulnya *happy* dengan *unit-linked*, yang kebutuhan asuransinya terjawab dengan produk ini.

"Perubahannya [aturan *unit-linked*] agak drastis. Beberapa hal saat ini masih didiskusikan. Kami sebetulnya ada target dalam tahun ini peraturan SE baru keluar," katanya.

Sementara itu, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. (Sinarmas MSIG Life) juga mencatatkan pertumbuhan premi produk *unit-linked* sepanjang semester I/2021.

Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life Wianto Chen mengatakan, perusahaan membukukan pendapatan premi bruto senilai Rp1,9 triliun sepanjang semester I/2021 atau naik 46% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi produk, pertumbuhan perolehan premi ini didorong oleh produk *unit-linked*.

"*Unit-linked* tumbuh 38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara produk tradisional tumbuh 20%. Saya lihat ada dua hal. Untuk yang tradisional ini didorong karena memang *demand* naik karena kesadaran masyarakat terutama akibat kondisi Covid-19. Untuk *single premium* dan *unit-linked* ini banyak dipengaruhi situasi *market*," katanya menjawab pertanyaan Bisnis, baru-baru ini. ■

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Judul</b>          | Mengenal kelas layanan standar BPJS Kesehatan yang akan berlaku mulai tahun 2022                                                                                                                                                                      |
| <b>Nama Media</b>     | Kontan.co.id                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Newstrend</b>      | Perubahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Halaman/URL</b>    | <a href="https://keuangan.kontan.co.id/news/mengenal-kelas-layanan-standar-bpjs-kesehatan-yang-akan-berlaku-mulai-tahun-2022">https://keuangan.kontan.co.id/news/mengenal-kelas-layanan-standar-bpjs-kesehatan-yang-akan-berlaku-mulai-tahun-2022</a> |
| <b>Tanggal Berita</b> | 2021-09-27                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sentimen</b>       | Netral                                                                                                                                                                                                                                                |

KEUANGAN /

## Mengenal kelas layanan standar BPJS Kesehatan yang akan berlaku mulai tahun 2022

Seriis, 27 September 2021 / 11:27 WIB



KONTAN.CO.ID - Mengenal kelas layanan standar BPJS Kesehatan yang akan berlaku mulai tahun 2022.

Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto

**KONTAN.CO.ID - Jakarta.** Kelas layanan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan diubah. Mulai tahun 2022, kelas layanan BPJS Kesehatan berubah dari kelas 1, 2, dan 3 menjadi kelas standar. Apa itu kelas standar BPJS Kesehatan?

BPJS kesehatan berencana untuk mengubah penerapan kelas pelayanan di fasilitas kesehatan yang selama ini terbagi menjadi kelas 1, 2, dan 3 menjadi penerapan "kelas standar". Hal itu diungkapkan oleh Anggita Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien sewaktu dihubungi Kompas.com, Jumat (24/9/2021). "Dalam perencanaan akan menuju ke kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional (JKKN)," kata dia.

Muttaqien mengatakan, penerapan kelas standar BPJS Kesehatan yang akan diterapkan ini bertujuan untuk menjalankan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas di Program JKN. "Nanti segmentasi peserta otomatis berubah, tidak ada lagi kategori peserta kelas 1, 2, dan 3," katanya lagi.

Menurutnya, hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 23 (4) yang mengatakan bahwa jika peserta membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit maka diberikan berdasarkan "kelas standar". "Rawat jalan seperti biasa, disini yang dibahas terkait kelas rawat inap," ujarnya.

**Baca juga: Kemensos Tetapkan Jumlah Peserta PBI Jaminan Kesehatan Sebanyak 87,05 Juta**

**Rawat inap kelas standar BPJS Kesehatan bertahap mulai 2022**

Pelayanan rawat inap kelas standar ini akan dilakukan bertahap mulai 2022 dan selanjutnya dilakukan pada 1 Januari 2023. Hal tersebut sebagaimana ketentuan pada PP 47 Tahun 2021 dan Perpres 64 Tahun 2020 Pasal 54 B.

Kendati demikian, pihaknya belum dapat memastikan waktu pasti terkait penerapan kelas standar pada pelayanan rawat inap di pelayanan BPJS ini. "Belum ditentukan. Tapi seperti ini belum memungkinkan jika dilaksanakan pada Januari 2022," kata dia.

Adapun terkait besaran iuran, hingga saat ini menurutnya belum diketahui karena masih terus berproses. Pemerintah, menurutnya harus memperhitungkan iuran dengan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku.

Selain itu, perhitungan iuran harus dilakukan paling tidak dengan memperhatikan inflasi, dan biaya kebutuhan jaminan kesehatan. "Yang sangat penting juga adalah memperhatikan kemampuan membayar iuran peserta, terutama jika kita lihat di masa pandemi seperti sekarang ini," ujarnya.

**Konsep kelas standar BPJS Kesehatan**

Menurut Muttaqien, konsep akhir yang dituju pada perubahan pelayanan BPJS menjadi kelas standar ini akan menyesuaikan Amanah UU SJSN yakni ekuitas. Dirinya mengatakan, ekuitas berarti tidak ada perbedaan manfaat medis maupun non medis pada peserta JKN.

Adapun nanti ketika peserta menginginkan pelayanan yang lebih tinggi dari kelas rawat inap (KRI) JKN, maka peserta dapat meningkatkan haknya melalui mekanisme Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KARJ) dengan membayar selisih biaya melalui asuransi kesehatan tambahan, pemberi kerja, maupun membayar sendiri.

Terkait dengan rencana ini, DJSN menurutnya bersama Kemenkes, Kemenkeu, dan BPJS Kesehatan dan juga dibantu beberapa akademisi Perguruan Tinggi telah mendiskusikan kriteria KRI JKN. Ia juga mengatakan telah dilakukan serangkaian konsultasi publik kepada stakeholder, melakukan self assesment kepada 1.916 RS di Indonesia, menyusun Peta Jalan KRI JKN, dan bersama BPJS Kesehatan sedang melakukan survei kepada Peserta JKN.

|                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Judul</b>          | Penghapusan Kelas BPJS Kesehatan                                                                                                                    |
| <b>Nama Media</b>     | Merdeka.com                                                                                                                                         |
| <b>Newstrend</b>      | Perubahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)                                                                                                          |
| <b>Halaman/URL</b>    | <a href="https://www.merdeka.com/khas/penghapusan-kelas-bpjs-kesehatan.html">https://www.merdeka.com/khas/penghapusan-kelas-bpjs-kesehatan.html</a> |
| <b>Tanggal Berita</b> | 2021-09-27                                                                                                                                          |
| <b>Sentimen</b>       | Netral                                                                                                                                              |

## Penghapusan Kelas BPJS Kesehatan

Sendo, 27 September 2021 00:07  
 Reporter: [Wahidul Huda](#), [Maulid](#), [Anggun H. Shumandig](#), [Henry](#)  
 Update: [Bani](#)



BPJaming Diagram: ©2019 Merdeka.com/Indo Barito

**Merdeka.com** - Sebelum akan sakit, Nita, warga Cimanggis, Depok, Jawa Barat, harus bergeser menuju puskesmas. Mendaftar baris untuk berobat. Nita harus beresbut nomor antrian pemeriksaan dokter, dengan peserta Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lainnya.

Sesampainya di Puskesmas, tak jarang sudah terjadi antrian cukup panjang. Nita dan pasien lainnya diuji kesehatannya. Menunggu faskes layanan khusus bagi peserta BPJS dibuka. Ketika tiket dibuka, satu per satu pasien BPJS menyerahkan berkas demi mendapat nomor antrian beresbutan nomor antrian dokter.

"Kalau daftar pasien BPJS itu mesti pagi-pagi. Padahal kemarin dokternya sore malah pernah malam," usap Nita kepada [merdeka.com](#), pekan lalu.

Nita dan lima anggota keluarga lainnya yang masih tinggal satu atap, terdaftar sebagai peserta BPJS kelas 3. Setiap penyakitnya kumat, dia harus bersiap diri menerima kunjungan panti layanan kesehatan peserta BPJS.

Nita dirumahnya, jadwal praktik dokter penyakit jam empat sore. Kenyataan tak selalu sesuai harapan. Kadang jam sudah melampaui pukul lima sore, dokter yang dinanti tak kunjung tiba. Kata petugas, dokter baru datang jam tujuh malam.

"Kenapa kita tidak diutamakan dengan pasien umum yang kalau mendaftar di rumah sakit tidak pakai antrian 'kamu harus daftar pagi ya,'" katanya.

Di kalangan peserta BPJS, predikat sebagai anak tiri dalam layanan kesehatan seolah melekat. Tak hanya di puskesmas, fasilitas kesehatan seperti Puskesmas atau Rumah Sakit. Terkadang sampai ke dalam ruang pemeriksaan kesehatan. Erit, warga Yogyakarta pernah mengalaminya.

Bahkan, sekedar memeriksa denyut nadi pun, tidak dilakukan. Saat itu Dokter sekedar menanyakan keluhan kesehatan. Lalu, diberi resep obat. Setelah lima menit, Erit meninggalkan ruang pemeriksaan.

"Kalau pakai BPJS walaupun kelas 1, 2 atau 3 sama saja," kata Erit.

Dari pengalaman bertahun-tahun sebagai warga negara kelas dua yang mendapat layanan kesehatan minim, Nita maupun Erit tak bersemangat mendengar wacana penghapusan kelas layanan BPJS Kesehatan. Dia pessimis, penghapusan kelas dianggap dengan perbaikan layanan. Belum lagi masalah ketersediaan ruang jika kelas 1 dihapus. Kebutuhan rumah beberapa kali dituntut, namun tak ada pengaruhnya pada sistem pelayanan.

"Nanti apa layanan yang diberikan akan sebanding? Kalau yang sekarang saja peserta kelas 1 BPJS kadang masih suka diarahkan ke bangsal," singkat Nita.



Wacana perubahan skema BPJS yang menggami kelas 1, 2 dan 3 dengan kelas standar merupakan antrian dari undang-undang. Tertuang dalam UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 23 ayat 4. Bunyinya "dalam hal peserta membayarkan premi, up to 40%, maka kelas pelayanan di 40% diberikan berdasarkan kelas standar."

Teknisnya diatur dalam Perpres 68 Tahun 2020 yang merupakan Perubahan Kedua atas Perpres 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Diamanahkan di Pasal 94 B, perubahan kelas standar dilakukan secara bertahap sampai dengan paling lambat tahun 2022.

Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Achmad Yurianto memastikan aturan baru soal kelas dalam pelayanan BPJS akan diberlakukan secara menyeluruh pada 2022.

"BPJS (Kelas Kawat Inap Standar) dibuat BPJSN. Jadi BPJS selaku pelaksana penjaminan pembiayaan belum punya pedoman pelaksanaannya," singkatnya.

Ada syarat yang diajukan (Penghapusan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persu) terkait penghapusan kelas perawatan. Yaitu revisi tarif pada tarif kelas 1 kelas 2 kelas 3. Saat dibuat kelas standar, maka tidak akan terjadi perubahan. Artinya pendapatan akan sesuai dengan satu tarif. Di satu sisi diakui, mayoritas pendapatan BPJS berasal dari BPJS.

"Maka tarif yang akan keluar itu harusnya bisa menjaga supaya rumah sakit itu bisa berkembang dan berkembang. Menjaga industri rumah sakit di Indonesia. Kami akan menerima regulasi itu dengan catatan kebijakan itu tidak merendahkan rumah sakit," kata Ketua Kamarpermen Jaminan Kesehatan Perdi Dr. Daniel Budi Wibowo.

Kebijakan ini mengharuskan rumah sakit untuk berbenah diri. Melakukan penyesuaian kelas perawatan. Ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Karena mengangkut biaya investasi dan biaya untuk perawatan.

"Kami meminta waktu yang cukup supaya regulasi ini syarat-syarat untuk kelas standar ini tidak harus diterapkan sekaligus."

Perubahan ini akan diimplementasikan secara bertahap. Proses transisi menjadi kelas tunggal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Seperti tertuang dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (JSN).

"Dari kondisi sekarang yang terdiri dari kelas 1, 2, 3 secara bertahap menjadi 2 kelas standar terlebih dahulu. Selanjutnya akan terus diawasi sambil menggapai menjadi menjadi 1 kelas JKN. Pada kondisi yang sudah ideal nanti, di RS akan ada JKN JKN dan Non-JKN," jelas Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Mutiawati saat berbincang dengan [merdeka.com](#).

Mengapa JKN, bertinggal dari penghapusan kelas dilihat dari dua yaitu manfaat medis dan non medis. Manfaat medis menjadi tanggungjawab Komititas yang sampai sekarang masih berproses diskusi. Termasuk implikasi pada perubahan daftar jenis penyakit yang bisa dijangkau BPJS Kesehatan. Sedangkan manfaat non medis berupa kelas rawat inap JKN yang menjadi tugas DJSN untuk mempersiapkannya.

Ini dari perubahan menjadi kelas standar adalah memastikan peserta JKN mudah mengakses tempat tidur atau ruang perawatan. Tak ada diskriminasi. Selama ini pasien umum lebih didahulukan ketimbang pasien BPJS. Jadi bukan hanya mengubah regulasi, tapi juga sistem dan pola pikir untuk keadilan bagi peserta BPJS.

"Sehingga mereka benar-benar memastikan ketika ada pasien atau peserta JKN membutuhkan ruang perawatan mereka serikan. Kalau nanti sama saja (jangan JKN) susah mengakses apa manfaatnya kita berubah menjadi kelas standar," pesan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Limboel Sirang.



Perubahan layanan kelas rawat inap (KRI) standar A dan B pada pasien BPJS tidak ada artinya tanpa dibarengi keadilan pada sistem layanan kesehatan. Pakar kesehatan Hermawan Saputra menduga, pada akhirnya tetap saja dipisahkan antara pasien BPJS dan non-BPJS.

"Esensinya justru itulah yang akan membedakan menganak-tirikan BPJS itu sama saja tidak ada perubahan kan."

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Heryawan memahami esensi dari rencana pemerintah menghapus kelas peserta BPJS. Netty menangkap tujuannya. Nantinya semua kelas peserta BPJS Kesehatan akan dilibur. Hanya ketika peserta BPJS membutuhkan perawatan inap. Untuk menghindari kesan diskriminasi. Sehingga semakin banyak ruangan bisa melayani pasien.

Jika mengacu pada niat dari perubahan ini, maka keuntungan yang akan didapatkan warga dengan perubahan skema peserta BPJS seharusnya pelayanan akan lebih maksimal.

"Maka dibuatkan kelas standar. Saya melihat kasat mata ya, kalau nanti 1 kamar itu misalnya dibuat lebih banyak tempat tidurnya, maka ketika ada tumpukan pasien semakin banyak pasien yang terlayani sebetulnya," jelas Netty.

Di mata Netty, penghilangan kelas peserta BPJS seharusnya berimplikasi pada tenaga kesehatan yang memberikan layanan pada pasien. Dia menganalogikan, jika masih memakai istilah kelas 1, 2 dan 3, seolah kemampuan nakes berbeda. Dengan menyamakan layanan menjadi kelas standar, maka semua peserta BPJS bisa merasakan layanan yang optimal dan sama baiknya.

"Jadi kalau nanti masang infusnya, ini candaan saya, harusnya tidak ada rasa sakit kan," ucapnya.

Terlepas dari wacana ini, Netty kerap berpesan agar kebijakan yang dibuat pemerintah tidak dilakukan tergesa-gesa. Sehingga tidak ada penilaian bongkar pasang kebijakan. Ketegesaan menimbulkan kesan bongkar pasang dan yang akan terkena dampaknya masyarakat. Sebelum jauh melangkah mengenai wacana penghapusan kelas BPJS, yang prioritas dihadapi saat ini adalah memberikan layanan terbaik pasien BPJS di tengah Pandemi Covid-19.

"Memberikan sebuah relaksasi kepada peserta khusus pekerja bukan penerima upah dan pekerja menerima upah dari Badan usaha untuk bisa terus menjadi peserta BPJS kesehatan," pesannya.



#### Besaran Iuran

Wacana perubahan skema kepesertaan BPJS yang berdampak penghapusan kelas dinilai tidak mudah membalikkan telapak tangan. Pakar kesehatan Hermawan Saputra melihat dibutuhkan setidaknya 10 tahun. Mulai dari pengkajian hingga implementasi.

Hal kedua, yakni dari segi permintaan. Berbicara penghapusan kelas peserta BPJS, berarti terkait pula belanja kesehatan. Jika peserta BPJS kelas 2 dihilangkan, maka akan berdampak terhadap daya beli dan kemauan belanja masyarakat di sektor kesehatan. Perubahan kelas kemungkinan akan berdampak pada iuran.

"Rata-rata kemauan kita untuk membelanjakan duit di sektor kesehatan itu masih rendah," tuturnya.

DJSN belum bicara mengenai dampak penghapusan kelas terhadap kewajiban iuran yang harus dibayarkan peserta BPJS Kesehatan. Menurut Anggota DJSN Muttaqien, komposisi iuran hingga saat ini masih proses pengkajian. Iuran akan dibagi antara kelas penerima bantuan iuran (PBI) dan non-PBI. Memperhatikan besaran inflasi, biaya kebutuhan jaminan Kesehatan dan yang paling penting kemampuan peserta. Terutama harus dilihat di masa Pandemi.

Prosesnya, sesuai Perpres 64 Tahun 2020, DJSN dan kementerian terkait akan mengusulkan iuran peserta BPJS Kesehatan kepada Presiden. Keputusan ada di tangan Kepala Negara.

"Kebijakan yang akan dicapai tentu untuk terus mendorong keberlanjutan, kualitas, dan keadilan Program JKN yang telah terbukti memberikan manfaat kepada masyarakat," kata Muttaqien.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbowl Stregar mendengar besaran iuran peserta BPJS nantinya akan berada antara Rp50.000 dan Rp75.000. Bagi peserta BPJS kelas 3 yang saat ini jumlahnya sekitar 20 juta orang, tentu akan memberatkan. Dia berpesan agar besaran iuran tidak memberatkan.

"Jangan sampai nanti dinaikkan iurannya malah banyak yang menunggak sehingga akan lebih banyak orang yang tidak mendapatkan JKN," jelasnya.

|                       |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Judul</b>          | BPJS Kesehatan hapus kelas rawat inap, lantas bagaimana iurannya?                                                                                                                                                   |
| <b>Nama Media</b>     | Kontan.co.id                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Newstrend</b>      | Perubahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)                                                                                                                                                                          |
| <b>Halaman/URL</b>    | <a href="https://keuangan.kontan.co.id/news/bpjs-kesehatan-hapus-kelas-rawat-inap-lantas-bagaimana-iurannya">https://keuangan.kontan.co.id/news/bpjs-kesehatan-hapus-kelas-rawat-inap-lantas-bagaimana-iurannya</a> |
| <b>Tanggal Berita</b> | 2021-09-28                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sentimen</b>       | Netral                                                                                                                                                                                                              |

## BPJS Kesehatan hapus kelas rawat inap, lantas bagaimana iurannya?

Selasa, 28 September 2021 / 04:00 WIB



Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

**KONTAN.CO.ID - JAKARTA.** Kategori kelas dalam layanan rawat inap dalam program BPJS Kesehatan akan dihapus. Ini artinya, semua layanan rawat inap bagi pemegang kartu BPJS adalah kelas standar.

Informasi itu disampaikan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien kepada Kompas.com, Jumat (24/9/2021).

"Dalam perencanaan akan menuju ke kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional," kata Muttaqien.

Ia mengatakan, penghapusan kelas dan penerapan kelas standar bertujuan untuk menjalankan prinsip asuransi sosial dan equitas di program JKN.

"Nanti segmentasi peserta otomatis berubah, tidak ada lagi kategori peserta kelas 1, 2, dan 3," lanjut dia.

Baca Juga: [9 Juta orang miskin bakal dikeluarkan dari JKN, BPJS Watch: Cabut Kepmensos 92/2021](#)

Ia mengatakan, penghapusan kategori kelas itu sesuai dengan amanat Undang-undang Sistem Jaminan Sosial (SJSN) Pasal 23 (4) yang mengatakan bahwa jika peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka diberikan "kelas standar".

Muttaqien menegaskan bahwa penghapusan kategori kelas BPJS itu hanya berlaku untuk rawat inap. Sementara rawat jalan normal seperti biasanya.

### Soal iuran BPJS

Dijelaskan, penerapan rawat inap kelas standar ini akan mulai berlaku pada 2022, atau paling lambat Januari 2023. Sementara soal iuran, Muttaqien mengatakan belum mengetahuinya. Sebab, saat ini masih berproses.

Baca Juga: [Mengetahui kelas layanan standar BPJS Kesehatan yang akan berlaku mulai tahun 2022](#)

Menurutnya, iuran BPJS harus diperhitungkan berdasarkan beberapa pertimbangan, mulai dari inflasi dan biaya kebutuhan jaminan kesehatan. "Yang penting juga adalah memperhatikan kemampuan membayar iuran peserta, terutama jika kita lihat di masa pandemi seperti sekarang ini," tandasnya.

(Sumber: Kompas.com/ Penulis: Nur Rohmi Aida | Editor: Sari Hardiyanto)

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Judul</b>          | Kelas Standar BPJS dan Bayang Tambahan Beban Masyarakat Bawah                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nama Media</b>     | Cnnindonesia.com                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Newstrend</b>      | Perubahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Halaman/URL</b>    | <a href="https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210928064438-78-700255/kelas-standar-bpjs-dan-bayang-tambahan-beban-masyarakat-bawah">https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210928064438-78-700255/kelas-standar-bpjs-dan-bayang-tambahan-beban-masyarakat-bawah</a> |
| <b>Tanggal Berita</b> | 2021-09-28                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sentimen</b>       | Netral                                                                                                                                                                                                                                                                |

[illegible]

Ini, ada setting lagi dari sistem penjaminan beres standar ini?

Dikoreksi oleh Tuhul Abadi Mandiri dua kelas standar ini memiliki nilai lebih atau plus dari ini berdasarkan. Artinya, pengap tarif dan pelayanan tidak berbeda bagi masyarakat, khususnya bagi rumah-rumah.

Harapannya tentu kualitas layanan rawat inap bagi peserta kelas mandiri 2 yang ada ini paling rendah bisa setara di tempat dengan yang ada di dua kelas mandiri 1 yang memang ada di kelas mandiri 1 dan 2, sehingga tidak ada perbedaan.

**Uraian juga :**

Mamarti Needs Pegawati 7 BUMN Aban Disuburkan Erick Thunor

Dari segi administrasi pun, diharapkan bisa lebih sederhana sehingga penjaminan kesehatan bagi BPJS kesehatan selaku pengumpul iuran.

Pembiayaan juga diharapkan bisa lebih efektif karena keuangan perusahaan ke rumah.

Kendali lagi, rencana ini bukan berarti hanya kelas atas ada juga kelas menengah (menak). Mulai dari masyarakat, rumah sakit (RS), hingga BPJS kesehatan itu sendiri.

Bagi masyarakat, Tuhul menjadi rencana ini tentu akan memberikan peserta dari masyarakat bawah. Sebab, pembiayaan dua kelas standar ini akan disubsidi, ada subsidi iuran peserta yang RSK dipukul atau menjadi satu tarif di kelas Rp50 ribu sampai Rp75 ribu per peserta.

Bila dibandingkan dengan beban iuran berdasarkan kelas layanan saat ini, maka lebih tinggi dari iuran peserta kelas mandiri 2 sebesar Rp15 ribu per peserta. Namun, lebih rendah dari peserta kelas mandiri 1 sebesar Rp30 ribu dan kelas mandiri 3 Rp500 ribu per peserta.

**Uraian juga :**

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Judul</b>          | BPJS KESEHATAN Terapkan Kelas Standar Mulai 2022 |
| <b>Nama Media</b>     | Koran Kaltim                                     |
| <b>Newstrend</b>      | Perubahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)       |
| <b>Halaman/URL</b>    | 3                                                |
| <b>Tanggal Berita</b> | 2021-09-28                                       |
| <b>Sentimen</b>       | Netral                                           |

## BPJS Kesehatan Terapkan Kelas Standar Mulai 2022

**JAKARTA** – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengungkapkan layanan BPJS Kesehatan berdasarkan kelas 1, 2, dan 3 akan diganti menjadi kelas standar pada 2022.

“Jadi ke depan, di RS akan ada dua kelas, yaitu kelas JKN untuk peserta JKN dan non-JKN untuk peserta umum atau peserta JKN yang ingin naik kelas perawatan,” ungkap Anggota DJSN Muttaqien dilansir *CNNIndonesia.com*, Senin (27/9).

Bersamaan dengan penetapan kelas standar ini, nantinya BPJS Kesehatan akan bekerja sama dengan RS untuk menentukan kriteria atau indikator dalam penentuan standar tersebut. Kriteria ini untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien yang lebih optimal tanpa ada perbedaan, sehingga pasien JKN akan dilayani dengan lebih baik.

Dengan begitu, penetapan kelas standar ini diharapkan bisa memperbaiki ekosistem JKN yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

Ia juga memastikan penetapan kelas standar ini bukan berarti layanan yang diberikan hanya berupa standar terendah atau minimal.

“Kelas standar ini jangan diartikan dalam istilah kelas minimal, tapi adalah standardisasi untuk kelas rawat inap JKN,” jelasnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan besaran iuran untuk masing-masing kelas standar ini belum bisa disampaikan ke publik. Sebab, masih dalam difinalisasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara mendalam dan hati-hati bersama Kementerian Kesehatan.

Misalnya, memperhatikan

besaran inflasi pengeluaran masyarakat, besaran biaya kebutuhan jaminan kesehatan, hingga tingkat kemampuan membayar dari para peserta iuran.

“Iuran tentu akan memperhitungkan iuran ini dengan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku,” tuturnya.

Selain itu, besaran iuran juga akan didiskusikan dengan kementerian/lembaga lain hingga para ahli dan aktuaris. Bila sudah ada angka final untuk iuran, maka selanjutnya akan diusulkan DJSN ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan turut memberitahu Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Setelah itu, akan dilakukan harmonisasi regulasi, uji publik, sosialisasi dan edukasi, hingga uji coba. Sayangnya,

ia belum bisa memberi target kapan sekiranya berbagai rangkaian penetapan iuran ini akan dilakukan dan final.

Muttaqien mengatakan perubahan layanan kelas ini sesuai dengan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut beleid tersebut, sambungnya, peserta membutuhkan rawat inap di RS berdasarkan kelas standar.

Sementara Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan perusahaan belum tahu menahu soal perubahan tersebut. Namun, akan siap menjalankan bila ada kebijakan final dari DJSN dan pemerintah.

“Kami tentu akan menjalankan kebijakan pemerintah dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. **(cnn)**

|                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Judul</b>          | OJK Dukung Pengembangan UMKM Lewat Gernas BBI                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nama Media</b>     | Detik.com                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Newstrend</b>      | Pengembangan UMKM Lewat Gernas BBI                                                                                                                                                                                            |
| <b>Halaman/URL</b>    | <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5742798/ojk-dukung-pengembangan-umkm-lewat-gernas-bbi">https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5742798/ojk-dukung-pengembangan-umkm-lewat-gernas-bbi</a> |
| <b>Tanggal Berita</b> | 2021-09-27                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sentimen</b>       | Netral                                                                                                                                                                                                                        |

## OJK Dukung Pengembangan UMKM Lewat Gernas BBI

Khoirul Anam - detikFinance

Senin, 27 Sep 2021 21:22 WIB

0 komentar

SHARE  



Foto: dok. OJK

**Jakarta** - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar diskusi dengan tema 'UMKM Bangkit Ekonomi Tumbuh' dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia (Gernas BBI). Diskusi tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso serta diikuti oleh Pimpinan Bank Himbara, Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah, Bursa Efek Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan, serta Perwakilan Asosiasi Fintech.

Wimboh mengatakan, pertemuan tersebut merupakan upaya OJK memperkuat kerja sama dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) dalam mengembangkan UMKM.

"Untuk mencapai tujuan dan target program Gernas BBI, sektor jasa keuangan diharapkan dapat berkomitmen untuk terus memfasilitasi pengembangan ekosistem UMKM berbasis digital, memperluas akses pembiayaan UMKM dari hulu ke hilir, melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan UMKM," kata Wimboh dalam keterangan tertulis, Senin (27/9/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya, ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai program dalam mendorong perkembangan UMKM, seperti replikasi KUR Klaster dengan total penyaluran kredit Rp 140,7 triliun kepada 3,82 juta debitur dan membangun ekosistem digital Bank Wakaf Mikro (BWM) yang saat ini telah berdiri 61 BWM dengan jumlah pembiayaan disalurkan Rp 72,5 miliar bagi 47,9 ribu nasabah.

Di samping itu, OJK menyediakan platform pemasaran UMKM MU dengan jumlah UMKM terdaftar sebanyak 1.125 UMKM dan 1.412 kurasi produk unggulan di platform UMKM, melakukan kerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang saat ini telah dibentuk 289 TPAKD, serta mendukung program DigiKu serta menginisiasi pendirian Kampus UMKM.

"Selain itu, dalam memberikan ruang untuk UMKM dapat bertahan dan bangkit kembali di masa pandemi, OJK telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi melalui POJK 11 tahun 2020 yang diperpanjang hingga Maret 2023," kata Wimboh.

Ia menyebut, data kredit perbankan UMKM per Juli 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,93% secara year-on-year (yoy), dan terbanyak disalurkan oleh bank-bank BUMN sebesar 58,63% dari total kredit UMKM Rp 645,2 triliun dengan pertumbuhan positif sebesar 5,12% secara yoy.

Selain itu, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah PT Bank Rakyat Indonesia Amam Sukriyanto, mewakili Himbara mengatakan akan meningkatkan pembiayaan kepada UMKM melalui berbagai program.

"Terkait dengan Gernas BBI, Himbara telah aktif berpartisipasi mulai dari Juni 2020. Kami juga sudah menginisiasi launching digiKU. Berdasarkan data per 24 Agustus 2021, kami sudah menyalurkan Rp 2,45 triliun dari sisi pinjaman digital kepada 240.000 lebih debitur UMKM," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja menyampaikan, diperlukan pembinaan terhadap UMKM sehingga bisa meningkatkan kualitas produk dan jangkauan penjualan. Menurutnya, program edukasi kepada UMKM sangatlah penting, sehingga pihaknya memberikan program edukasi kepada UMKM bagi UMKM kelas kecil, menengah, dan besar.

Adapun, lanjutnya, kurikulum yang diusung terdiri dari lima kegiatan, yaitu webinar, workshop, coaching clinic, monitoring, dan apresiasi. Ia berharap, akan ada sinkronisasi antara lembaga pemerintah, sehingga ketika mobilisasi telah dapat dilakukan, perbankan dapat mendukung program UMKM lebih baik.

Sedangkan Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan dukungan diberikan dengan menyiapkan UMKM untuk raising fund di pasar modal.

#### **Baca juga:**

**Kisah UMKM Batik Dorong Ibu-ibu Rusun Marunda Mandiri Secara Ekonomi**

"Kami akan memperhatikan dua aspek yaitu size dan kualitas bisnis modelnya juga harus proven. Kami juga telah membuat IDX Incubator pada tahun 2017 yang merupakan sebuah pendidikan yang kita design untuk UMKM agar dapat mengasah bisnis modelnya, mempersiapkan legal aspect dan finance aspect," katanya.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiratno juga menegaskan dukungannya terhadap pengembangan UMKM dengan meningkatkan porsi pembiayaan UMKM menjadi 31% hingga Juli 2021.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah membentuk Tim Gernas BBI yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. Susunan Tim Gernas BBI diketuai oleh Kemenko Marves, sementara Kemenko Perekonomian, OJK, dan BI bertindak sebagai wakil ketua.

Target yang diharapkan dapat tercapai oleh Gernas BBI melalui dukungan sektor keuangan adalah peningkatan jumlah artisan Indonesia (UMKM) yang onboarding menjadi 30 juta, peningkatan permintaan terhadap produk ekonomi kreatif buatan Artisan Indonesia terutama menjadi komoditi ekspor, peningkatan daya beli masyarakat, perluasan pasar, akses permodalan, pelatihan, pendataan, dan percepatan siklus ekonomi lokal melalui belanja produk lokal, dan stimulus ekonomi, untuk UMKM/IKM termasuk Pelaku Ekonomi Kreatif Gernas BBI.

|                       |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Judul</b>          | OJK dan Industri Jasa Keuangan Berkomitmen Dukung UMKM                                                                                                                                            |
| <b>Nama Media</b>     | Investor.id                                                                                                                                                                                       |
| <b>Newstrend</b>      | Pengembangan UMKM Lewat Gernas BBI                                                                                                                                                                |
| <b>Halaman/URL</b>    | <a href="https://investor.id/finance/264969/ojk-dan-industri-jasa-keuangan-berkomitmen-dukung-umkm">https://investor.id/finance/264969/ojk-dan-industri-jasa-keuangan-berkomitmen-dukung-umkm</a> |
| <b>Tanggal Berita</b> | 2021-09-27                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sentimen</b>       | Netral                                                                                                                                                                                            |



OJK menggelar pertemuan bertajuk "UMKM Bangkit Ekonomi Tumbuh" bersama sejumlah pimpinan UK. Senin, 27 September 2021.

## OJK dan Industri Jasa Keuangan Berkomitmen Dukung UMKM

Senin, 27 September 2021 2:03 WIB

**JAKARTA, investor.id** - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan, industri keuangan non bank, pasar modal dan fintech berkomitmen untuk terus meningkatkan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Komitmen OJK dan Industri Jasa Keuangan (IJK) tersebut disampaikan dalam pertemuan yang digelar OJK bersama sejumlah pimpinan IJK secara hybrid di kantor OJK Jakarta, Senin (27/9).

Diskusikan dengan tema "UMKM Bangkit Ekonomi Tumbuh" dalam rangka memperkuat sinergi mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso serta diikuti oleh Pimpinan Bank Hindbara, Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah, Bursa Efek Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan serta Perwakilan Asosiasi Fintech.

Wimboh mengatakan, bahwa pertemuan ini merupakan upaya OJK memperkuat sinergi dengan IJK untuk menjalankan upaya konkret dalam mengembangkan UMKM.

"Untuk mencapai tujuan dan target program Gernas BBI, sektor jasa keuangan diharapkan dapat berkomitmen untuk terus memfasilitasi pengembangan ekosistem UMKM berbasis digital, memperluas akses pembiayaan UMKM dari hulu ke hilir, melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan UMKM," kata Wimboh.

Sebelumnya, OJK juga telah melakukan berbagai program dan kebijakan mendukung pengembangan UMKM antara lain replikasi KUR Klaster dengan total penyaluran kredit Rp 143,71 triliun kepada 3,82 juta debitur, membangun ekosistem digital Bank Wakat Mikro (BWM) yang saat ini telah berdiri 61 BWM dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp72,5 miliar kepada 47,9 ribu nasabah, menyediakan platform pemantauan UMKMU dengan jumlah UMKM yang telah terdaftar saat ini terdaftar adalah sebanyak 1.125 UMKM dengan 1.412 kurasi produk unggulan di platform UMKM, melakukan kerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dimana saat ini telah dibentuk 269 TPAKD, mendukung program DigiKu serta menginisiasi pendirian Kampus UMKM.

"Selain itu, dalam memberikan ruang untuk UMKM dapat bertahan dan bangkit kembali di masa pandemi, OJK telah mengemukakan kebijakan restrukturisasi melalui POJK 11 tahun 2020 yang diperpanjang hingga Maret 2023," kata Wimboh.

Data kredit perbankan untuk UMKM hingga Juli 2021 tercatat masih tumbuh positif sebesar 1,95% secara yoy, dan terbanyak disalurkan oleh bank bank BUMN sebesar 56,50% dari total kredit UMKM (Rp45,2 triliun) dengan pertumbuhan positif sebesar 5,12% secara yoy.

### Komitmen IJK

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah PT Bank Rakyat Indonesia Anam Suknyanto, mewakili Hindbara mengatakan akan terus meningkatkan pembiayaan kepada UMKM melalui berbagai program.

"Terkait dengan Gernas BBI, Hindbara telah aktif berpartisipasi mulai dari Juni 2020. Kami juga sudah menginisiasi launching digiku. Berdasarkan data per 24 Agustus 2021, kami sudah menyalurkan Rp2,45 triliun dari sisi perantara digital kepada 240.000 lebih debitur UMKM," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BCA Jajha Setiaatmadja menyampaikan bahwa untuk mengembangkan UMKM perlu dilakukan pembinaan dan edukasi sehingga bisa meningkatkan kualitas produk dan jangkauan penjualan.

Menurutnya, program edukasi kepada UMKM sangatlah penting, sehingga BCA memberikan program edukasi kepada UMKM yang dikasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu UMKM kecil, menengah dan besar.

Kurikulum yang diusung terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu: (1) webinar; (2) workshop; (3) coaching clinic; (4) monitoring; dan (5) apresiasi.

Harapan ke depan, terdapat sinkronisasi antara setiap lembaga pemerintah, sehingga ketika mobilitasi telah dapat dilakukan, perbankan dapat mendukung program UMKM lebih baik lagi.

Sedangkan Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yenna mengatakan, BEI mendukung pengembangan UMKM dengan menyiapkan UMKM untuk raising fund di pasar modal.

"Kami akan memperhatikan dua aspek yaitu sisi dan kualitas bisnis modelnya juga harus proven. Kami juga telah memobil EDX Incubator pada tahun 2017 yang merupakan sebuah pendidikan yang kita design untuk UMKM agar dapat mengasah bisnis modelnya, mempersiapkan legal aspect dan finance aspect," katanya.

Komitmen mendukung pengembangan UMKM juga disampaikan Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiratno yang terus meningkatkan porsi pembiayaan UMKM menjadi 31 persen hingga Juli 2021.

Presiden RI telah membentuk Tim Gernas BBI yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021. Susunan Tim Gernas BBI diketuai oleh Menteri Koperasi, sementara Menteri Perencanaan, OJK dan RI bertindak sebagai Wakil Ketua.

Target yang diharapkan dapat tercapai oleh Gernas BBI melalui dukungan sektor keuangan di antaranya adalah peningkatan jumlah artisan Indonesia (UMKM) yang onboarding menjadi 50 juta. Kemudian, peningkatan permintaan terhadap produk ekonomi kreatif buatan Artisan Indonesia terutama menjadi komoditi ekspor. Lalu, peningkatan daya beli masyarakat, perluasan pasar, akses permodalan, pelatihan, penataan, dan percepatan siklus ekonomi lokal melalui belanja produk lokal. Target lainnya juga termasuk stimulus ekonomi, untuk UMKM diarahkan termasuk Pelaku Ekonomi kreatif Gernas BBI.

Editor : Jayanty Nada Shefa (JayantyNada.Shefa@beritasatunmedia.com)

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Judul          | Dukung Pengembangan UMKM Melalui GERNAS BBI |
| Nama Media     | Jawa Pos                                    |
| Newstrend      | Pengembangan UMKM Lewat Gernas BBI          |
| Halaman/URL    | 3                                           |
| Tanggal Berita | 2021-09-28                                  |
| Sentimen       | Netral                                      |

#### BERANDA INFO

# Dukung Pengembangan UMKM Melalui Gernas BBI

**OTORITAS** Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan, industri keuangan nonbank, pasar modal, dan *fintech* berkomitmen terus meningkatkan pengembangan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Komitmen OJK dan industri jasa keuangan (IJK) tersebut disampaikan dalam pertemuan yang digelar OJK bersama sejumlah pimpinan IJK secara *hybrid* di kantor OJK Jakarta, Senin (27/9).

Diskusi dengan tema *UMKM Bangkit Ekonomi Tumbuh* dalam rangka memperkuat sinergi mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso serta diikuti pimpinan bank Himbara, bank umum, bank pembangunan daerah, Bursa Efek Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan, serta perwakilan asosiasi *fintech*.

Wimboh Santoso mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan upaya OJK memperkuat sinergi dengan IJK untuk menjalankan upaya konkret dalam mengembangkan UMKM. "Untuk mencapai tujuan dan target program

Gernas BBI, sektor jasa keuangan diharapkan dapat berkomitmen untuk terus memfasilitasi pengembangan ekosistem UMKM berbasis digital, memperluas akses pembiayaan UMKM dari hulu ke hilir, melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan UMKM," kata Wimboh.

Sebelumnya, OJK juga telah melakukan berbagai program dan kebijakan untuk mendorong perkembangan UMKM. Di antaranya, replikasi KUR klaster dengan total penyaluran kredit Rp 140,7 triliun kepada 3,82 juta debitur, membangun ekosistem digital Bank Wakaf Mikro (BWM) yang saat ini telah berdiri 61 BWM dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 72,5 miliar kepada 47,9 ribu nasabah, serta menyediakan platform pemasaran UMKMMU dengan jumlah UMKM yang telah terdaftar saat ini sebanyak 1.125 UMKM dan 1.412 kurasi produk unggulan di platform UMKM. Selain itu, melakukan kerja sama dengan tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) yang saat ini telah dibentuk 289 TPAKD, mendukung program DigiKU, serta menginisiasi pendirian kampus UMKM.

"Selain itu, dalam memberikan ruang untuk UMKM dapat bertahan dan bangkit kembali di masa pandemi, OJK telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi melalui POJK 11 Tahun 2020 yang diperpanjang hingga Maret 2023," kata Wimboh.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah PT Bank Rakyat Indonesia Amam Sukriyanto mewakili Himbara menyatakan akan terus meningkatkan pembiayaan kepada UMKM melalui berbagai program. "Terkait dengan Gernas BBI, Himbara telah aktif berpartisipasi mulai dari Juni 2020. Kami juga sudah menginisiasi *launching* DigiKU. Berdasar data per 24 Agustus 2021, kami sudah menyalurkan Rp 2,45 triliun dari sisi pinjaman digital kepada 240.000 lebih debitur UMKM," katanya.

Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja menyampaikan bahwa untuk mengembangkan UMKM perlu dilakukan pembinaan dan edukasi sehingga bisa meningkatkan kualitas produk dan jangkauan penjualan. Menurut dia, program edukasi kepada UMKM sangat penting sehingga BCA memberikan program edukasi kepada UMKM yang diklasifikasi menjadi tiga kelas, yaitu UMKM kelas kecil, menengah, dan besar. (**als/c6/wir**)

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Judul</b>          | Komitmen OJK Dan Industri Jasa Keuangan Dukung Pengembangan UMKM Melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GERNAS BBI) |
| <b>Nama Media</b>     | Investor Daily                                                                                                                 |
| <b>Newstrend</b>      | Pengembangan UMKM Lewat Gernas BBI                                                                                             |
| <b>Halaman/URL</b>    | 24                                                                                                                             |
| <b>Tanggal Berita</b> | 2021-09-28                                                                                                                     |
| <b>Sentimen</b>       | Netral                                                                                                                         |

## Komitmen OJK dan Industri Jasa Keuangan Dukung Pengembangan UMKM Melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GERNAS BBI)

Jakarta, 27 September 2021. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan, industri keuangan non bank, pasar modal dan *fintech* berkomitmen untuk terus meningkatkan pengembangan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Komitmen OJK dan Industri Jasa Keuangan (IJK) tersebut disampaikan dalam pertemuan yang digelar OJK bersama sejumlah pimpinan IJK secara *hybrid* di kantor OJK Jakarta, Senin.

Diskusi dengan tema "UMKM Bangkit Ekonomi Tumbuh" dalam rangka memperkuat sinergi mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso serta diikuti oleh Pimpinan Bank Himbara, Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah, Bursa Efek Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan serta Perwakilan Asosiasi Fintech.

Wimboh Santoso dalam pertemuan itu mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan upaya OJK memperkuat sinergi dengan IJK untuk menjalankan upaya konkret dalam mengembangkan UMKM.

"Untuk mencapai tujuan dan target program Gernas BBI, sektor jasa keuangan diharapkan dapat berkomitmen untuk terus memfasilitasi pengembangan ekosistem UMKM berbasis digital, memperluas akses pembiayaan UMKM dari hulu ke hilir, melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan UMKM," kata Wimboh.

Sebelumnya, OJK juga telah melakukan berbagai program dan kebijakan mendorong perkembangan UMKM antara lain replikasi KUR Klaster dengan total penyaluran kredit Rp140,7T kepada 3,82 juta debitur, membangun ekosistem digital Bank Wakaf Mikro (BWM) yang saat ini telah berdiri 61 BWM dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp72,5 miliar kepada 47,9 ribu nasabah, menyediakan *platform* pemasaran UMKMMU dengan jumlah UMKM yang telah terdaftar saat ini terdaftar adalah sebanyak 1.125 UMKM dengan 1.412 kurasi produk unggulan di platform UMKM, melakukan kerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dimana saat ini telah dibentuk 289 TPAKD, mendukung program DigiKu serta menginisiasi pendirian Kampus UMKM.

"Selain itu, dalam memberikan ruang untuk UMKM dapat bertahan dan bangkit kembali di masa pandemi, OJK telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi melalui POJK 11 tahun 2020 yang diperpanjang hingga Maret 2023," kata Wimboh.



Data kredit perbankan untuk UMKM hingga Juli 2021 tercatat masih tumbuh positif sebesar 1,93% secara *yoy*, dan terbanyak disalurkan oleh bank-bank BUMN sebesar 58,63% dari total kredit UMKM (Rp645,2 triliun) dengan pertumbuhan positif sebesar 5,12% secara *yoy*.

Sementara itu, Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja menyampaikan bahwa untuk mengembangkan UMKM perlu dilakukan pembinaan dan edukasi sehingga bisa meningkatkan kualitas produk dan jangkauan penjualan.

Menurutnya, program edukasi kepada UMKM sangatlah penting, sehingga BCA memberikan program edukasi kepada UMKM yang diklasifikasi menjadi tiga kelas yaitu UMKM kelas kecil, menengah dan besar. Kurikulum yang diusung terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu: (1) *webinar*; (2) *workshop*; (3) *coaching clinic*; (4) *monitoring*; dan (5) apresiasi. Harapan ke depan, terdapat sinkronisasi antara setiap lembaga pemerintah, sehingga ketika mobilisasi telah dapat dilakukan, perbankan dapat mendukung program UMKM lebih baik lagi.

Sedangkan Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna mengatakan BEI mendukung pengembangan UMKM dengan menyiapkan UMKM untuk *raising fund* di pasar modal.

"Kami akan memperhatikan dua aspek yaitu size dan kualitas bisnis modelnya juga harus *proven*. Kami juga telah membuat IDX Incubator pada tahun 2017 yang merupakan sebuah pendirian yang kita design untuk UMKM agar dapat mengasah bisnis modelnya, mempersiapkan *legal aspect* dan *finance aspect*," katanya.

Komitmen mendukung pengembangan UMKM juga disampaikan Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiratno yang terus meningkatkan porsi pembiayaan UMKM menjadi 31 persen hingga Juli 2021.

Presiden RI telah membentuk Tim Gernas BBI yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. Susunan Tim Gernas BBI diketuai oleh Kemenko Marves, sementara Kemenko Perekonomian, OJK dan BI bertindak sebagai Wakil Ketua.

Target yang diharapkan dapat tercapai oleh Gernas BBI melalui dukungan sektor keuangan adalah:

1. Peningkatan jumlah artisan Indonesia (UMKM) yang *onboarding* menjadi 30 juta;
2. Peningkatan permintaan terhadap produk ekonomi kreatif buatan Artisan Indonesia terutama menjadi komoditi ekspor;
3. Peningkatan daya beli masyarakat, perluasan pasar, akses permodalan, pelatihan, pendataan, dan percepatan siklus ekonomi lokal melalui belanja produk lokal;
4. Stimulus ekonomi, untuk UMKM/IKM termasuk Pelaku Ekonomi Kreatif Gernas BBI.